



Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru)

Rasyidah Nadir¹, Hasyim²

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia

E-mail: rasyidah_nadir@yahoo.co.id

Abstract

This study aimed to examine the effect of the use of information technology, human resources and competencies on the quality of local government financial statements by the accrual based government accounting standards as intervening variable on the Government of Barru. Accrual accounting standards as defined in Regulation 71 of 2010 (PP No.71 Tahun 2010) concerning the Government Accounting Standards, and more technically set in Regulation 64 of 2013 (Permendagri No.64 Tahun 2013) concerning the Government Accounting Standards Implementation of Accrual Based on Local Government. The method used is descriptive survey. Samples were employees in the accounting/financial administration of the region on regional work units (SKPD) and Regional Financial Management Officer (PPKD) within the scope of local government Barru district. Methods of data collection is done by distributing questionnaires. Data were analyzed using path analysis. The results showed that the utilization of information technology have significant effect on the quality of financial statements Barru district government through the implementation of accrual based government accounting standards, while the competence of human resources has no significant effect on the quality of financial statements Barru district government through the implementation of accrual based government accounting standards.

Keywords: Information Technology, Human Resources and Competencies, Accrual Based Government Accounting Standards, Quality of Local Government Financial Statements.

PENDAHULUAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD disusun serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Bastian, 2010).

Pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagai pengganti PP No.24 tahun 2005. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dalam Permendagri No.64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan (pengguna), yaitu pengguna laporan keuangan pemerintah maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Kualitas laporan keuangan sebagaimana digambarkan dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (PP No.71 tahun 2010). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang menjadi prasyarat normatif yang

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah.

Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan SKPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal komputer, perangkat lunak, database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi (Wilkinson et al, 2000). Pemanfaatan teknologi mencakup adanya (a) pengolahan data. Pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Peningkatan penggunaan APBD menyebabkan volume transaksi keuangan pemerintah semakin besar dengan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi tersebut harus diikuti dengan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi komputer akuntansi dirasakan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik. Disamping itu kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini staf pengelola keuangan juga merupakan faktor terpenting dalam menyusun laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia harus sejalan dengan regulasi yang diterapkan pada pemerintah yaitu berdasarkan standar akuntansi pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Diberlakukannya SAP berbasis akrual, maka peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi sudah pasti akan berubah dari yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual memberikan informasi yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP berbasis kas menuju akrual. Tujuan utama diterapkan SAP berbasis akrual tersebut adalah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP merupakan salah satu bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan kepada rakyatnya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem akuntansi yang digunakan sebagai sarana penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan SAP yang berlaku. Atas LKPD tersebut, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal pemerintah melaksanakan audit atas LKPD berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Setelah LKPD diaudit maka diterbitkan opini audit oleh BPK.

Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK ditemukan masih banyak laporan keuangan kementerian/Lembaga/Pemda yang belum memperoleh opini WTP, hal ini disebabkan oleh



beberapa faktor yaitu (1) penyajian laporan keuangan yang sepenuhnya belum sesuai dengan SAP, (2) lemahnya sistem pengendalian intern, (3) belum tertatanya Barang milik negara/daerah secara tertib, (4) pengadaan barang yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku, dan (5) kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan yang belum memadai.

Lingkungan yang dinamis pada pemerintah daerah berdampak pada perubahan regulasi termasuk standar akuntansi pemerintah yang diacu, sebelumnya SAP berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual. Perubahan regulasi tersebut membutuhkan dukungan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia yang handal yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai untuk dapat menyusun laporan keuangan yang memenuhi unsur kualitas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono & Fidelis (2004), Dinata (2004), Imelda (2005) (dalam Indriasari, 2008), Roviyantie (2012), dan Desiana dkk (2014)

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi, sumber daya manusia, pengendalian internal terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada organisasi publik khususnya pemerintah daerah sudah pernah dilakukan diantaranya Indriasari (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Rukmini dan Juwita (2013), dan Udiyanti dan Darmawan (2014).

Laporan keuangan dan opini audit dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Barru disajikan dalam tabel 1.1 (Lampiran)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pemerintah kabupaten Barru mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam tahun anggaran 2009, kemudian mengalami penurunan penilaian dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), akan tetapi ditahun anggaran selanjutnya mengalami peningkatan opini yaitu untuk tahun 2011 dan 2012 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan ditahun anggaran 2013 sampai dengan tahun 2015 opini meningkat lagi menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemilihan pemerintah daerah kabupaten Barru sebagai objek penelitian karena pemda kabupaten Barru dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), dan meningkatkan opini pemeriksaan BPK dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, hal ini diduga karena penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Barru, dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari pengelola keuangan daerah, akan tetapi bagaimana kualitas laporan keuangan setelah diterapkan standar akuntansi berbasis akrual yang menurut perundang-undangan harus diterapkan di tahun anggaran 2015 untuk seluruh pemerintah daerah. Kondisi ini menarik bagi peneliti untuk mencari tahu apakah pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah mengingat sebelumnya pemda masih menerapkan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 untuk laporan keuangan tahun 2014 sebagaimana opini atas LKPD kabupaten Barru di tahun tersebut. Dalam penelitian ini standar akuntansi pemerintahan yang dimaksud adalah standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan PP No.71 tahun 2010 dan aturan teknis melalui Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, (2) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan (3) Apakah pemanfaatan teknologi Informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan dan literatur yang ada, maka penulis merumuskan hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H1: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

H2: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

H3: Pemanfaatan Teknologi Informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia, dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE

Rancangan Penelitian

Rancangan Penelitian dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu sampel penelitian akan ditentukan berdasarkan purposive sampling. Kriteria responden yang dituju kemudian disebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan dari keempat variabel penelitian yaitu pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi berbasis akrual, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang terkumpul kemudian dilakukan pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas untuk instrumen pertanyaan dan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

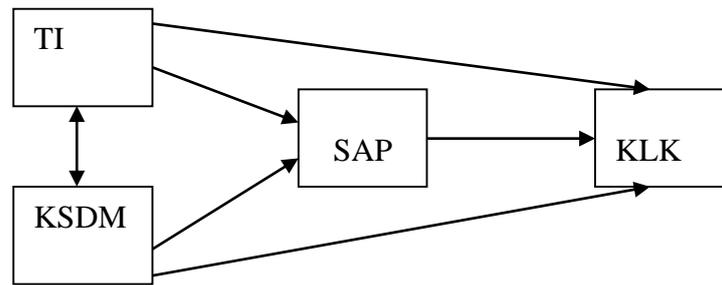
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner terhadap bagian akuntansi/penatausahaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada lingkup pemerintah daerah kabupaten Barru. SKPD adalah perangkat kerja pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang dan oleh karena itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. SKPD ini meliputi dinas, badan, kantor dan bagian.

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian pengelola keuangan pada 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Makassar yang meliputi, 14 Dinas, 7 Badan, 5 Kantor, dan 7 kecamatan. Selain itu terdapat Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat pengelola keuangan dari dinas/kantor/badan atau Kabid/Kasubid/Kabag/Kasubag/Kasi/Kasubsie pada SKPD di kabupaten Barru, penyampelan atas responden dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang terlibat dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada setiap unit SKPD. Responden dalam penelitian ini yaitu pejabat pengelola keuangan SKPD dan PPKD di wilayah pemerintah daerah kabupaten Barru.

Teknik analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda linear, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2007). Apa yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kasualitas imajiner (Ghozali, 2013).

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan masing-masing instrumen akan merefleksikan konstruk yang ditentukan (construct validity). Data yang valid adalah data 'yang tidak berbeda' antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono 2013:267). Data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2013:268).

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka model penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel. Jumlah keseluruhan populasi pada penelitian ini adalah 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Barru yang meliputi, 14 Dinas, 7 Badan, 5 Kantor, dan 7 kecamatan. Selain itu terdapat Inspektorat Daerah dan Sekretariat Daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barru. Kuesioner disebar mulai tanggal 19 Mei 2016 dan terkumpul sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016.

Kuesioner terdiri dari 34 butir pernyataan dengan perincian 9 butir pernyataan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 8 butir pernyataan kapasitas sumber daya manusia, 7 butir pernyataan pemanfaatan teknologi informasi, dan 10 butir pernyataan penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Adapun rincian pendistribusian kuesioner dan tingkat pengembalian tersebut dapat dilihat pada tabel 5.1 (Lampiran)

Analisis dilakukan pada 64 jawaban responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data mengenai statistik deskriptif disajikan dalam tabel 5.2 (Lampiran)

Tabel 5.2 menunjukkan statistik deskriptif dari jumlah 64 responden dengan melihat rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel pemanfaatan teknologi Informasi diperoleh rata-rata jawaban dari responden sebesar 3,96 dengan deviasi standar 3,355. Nilai rata-rata ini menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi Informasi yang dilaporkan oleh responden relatif tinggi. pada variabel kompetensi sumber daya manusia diperoleh rata-rata jawaban dari responden sebesar 3,69 dengan deviasi standar 5,080. Nilai rata-rata ini menunjukkan sedikit lebih rendah dari variabel pemanfaatan teknologi Informasi. variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual diperoleh rata-rata jawaban dari responden sebesar 3,86 dengan deviasi standar 4.387. Nilai rata-rata ini menunjukkan variabel standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilaporkan oleh responden relatif tinggi., dan kualitas laporan keuangan diperoleh rata-rata jawaban dari responden sebesar 4,06 dengan deviasi standar 5,0. Nilai rata-rata ini menunjukkan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga relatif tinggi.

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Teknik yang digunakan untuk melakukan uji validitas adalah koefisien korelasi pearson Correlation. Data dikatakan valid jika total setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 atau 0,01. Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel 5.4 (Lampiran).

Hasil uji validitas tabel 5.4, menunjukkan pearson correlation untuk setiap variabel yaitu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), pemanfaatan teknologi informasi (X1), kompetensi sumber daya manusia (X2), dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (M) signifikan pada

tingkat signifikan 0,05 dan 0,01. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan kuesioner mampu untuk mengukur variabel yang diharapkan.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach's Alpha (α). Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,70 maka data dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dapat terlihat pada tabel 5.5 (Lampiran)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas pada tabel 5.5, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha (α) untuk setiap variabel lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1967) dalam Ghozali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan untuk masing-masing variabel dikatakan reliabel.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, data diolah lebih lanjut dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Pada analisis jalur menunjukkan hubungan langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen, hubungan ini tergambar dalam model penelitian yang dihipotesiskan yaitu variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. dan menunjukkan pula hubungan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening atau mediasi.

Analisis jalur selain menunjukkan pengaruh langsung, juga menggambarkan bentuk intervening atau mediasi yaitu adanya pengaruh tidak langsung variabel Independen (X) ke variabel Dependen (Y) melalui variabel mediator (M), dalam penelitian ini variabel independen adalah pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia, variabel dependen adalah kualitas laporan keuangan, dan variabel intervening atau mediasi adalah standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berikut adalah hasil output SPSS untuk menguji pengaruh model penelitian yang dihipotesiskan.

Hasil pengujian memberikan nilai unstandardized coefficients beta variabel pemanfaatan teknologi informasi pada model penelitian yang digambarkan menunjukkan sebesar 0,377 dan signifikan pada 0,022 berarti pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan sebesar 0,118 dan signifikan pada 0,271 berarti kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.. Pengaruh mediasi akan ditunjukkan oleh perkalian koefisien, untuk hasil signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test, berdasarkan hasil uji sobel test maka dapat dihitung t statistik, jika t hitung lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi atau intervening signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi. Hasil uji Sobel test dan bootstrapping merupakan pendekatan alternatif untuk menguji signifikansi variabel intervening atau mediasi pada jumlah sampel kecil (Hayes dan Preacher, 2004) dalam Ghozali (2013).

Pada analisis jalur menunjukkan hubungan tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening, hubungan ini tergambar dalam model penelitian yang dihipotesiskan pada hipotesis pertama yaitu pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dan hipotesis kedua kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan pada hipotesis ketiga menunjukkan hubungan langsung dari variabel independen dan variabel mediasi terhadap variabel dependen. Hasil pengujian output SPSS untuk melihat pengaruh langsung model penelitian adalah sebagai berikut.

Pengaruh langsung pada output SPSS ditunjukkan dengan hasil pengujian nilai unstandardized coefficients beta variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan sebesar 0,004 dan signifikan pada 0,970, variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan sebesar 0,558 dan signifikan pada 0,002 dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menunjukkan sebesar 0,359 dan signifikan pada 0,008.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan



keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis jalur juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat berpengaruh langsung ke kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pemanfaatan teknologi informasi ke penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (sebagai intervening) lalu ke kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh langsung adalah 0,558 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya dari variabel pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu $(0,377) \times (0,359) = 0,13$. atau total pengaruh pemanfaatan teknologi informasi ke kualitas laporan keuangan pemerintah daerah = $(0,558) + (0,13) = 0,68$.

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ($p_2 \times p_3$) 0,12 yaitu perkalian koefisien 0,289 dan 0,312. Pengaruh mediasi 0,09 dengan tingkat signifikan 0,05.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Barru dan berpengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi atau intervening standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam mengelola transaksi keuangan berdasarkan APBD tentunya semakin kompleks karena volume transaksi semakin banyak. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu penggunaan teknologi komputer dan komunikasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan baik dalam hal keakurasian maupun ketepatan waktu dalam penyiapan laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Indriasari (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap unsur kualitas laporan keuangan yaitu ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah kabupaten Barru tentunya membutuhkan perangkat teknologi informasi untuk memproses transaksi keuangan daerah yang semakin kompleks, Hal ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dengan penggunaan komputer dan jaringan internet dalam penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten Barru berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem aplikasi SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah) dan SIADINDA (Sistem Informasi Manajemen Dinas Daerah) sepenuhnya terpenuhi di setiap bagian unit kerja SKPD meskipun masih dalam proses pendampingan dan masih cukup tinggi peran dan intervensi dari pejabat pengelola keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah Barru.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi yang diterapkan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kualitas laporan keuangan mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang digunakan. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah kabupaten Barru belum cukup memadai untuk memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah belum sepenuhnya memiliki tanggung jawab yang tinggi atas pengelolaan keuangan, dan setiap pengelola keuangan pada SKPD belum sepenuhnya diikutsertakan untuk mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi, workshop, dan pelatihan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sehingga terlihat dari hasil penelitian rata-rata aparatur pengelola keuangan memberikan jawaban yang cukup rendah untuk pernyataan keikutsertaan mereka dalam berbagai pelatihan, sosialisasi dan workshop.

Temuan hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Roviyantje (2012) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah kabupaten Tasikmalaya baik secara parsial maupun simultan, dan hasil penelitian Desiana dkk (2014) menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pemerintah kota Depok baik secara parsial maupun simultan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Indriasari (2008) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap unsur kualitas laporan keuangan yaitu ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir.

Kompetensi sumber daya manusia yang belum cukup pada aparatur pengelola keuangan pemerintah kabupaten Barru menunjukkan bahwa aparatur pengelola keuangan di setiap SKPD belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, meskipun untuk tahun anggaran 2015 pemerintah kabupaten Barru memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan ini merupakan prestasi tertinggi bagi pemerintah kabupaten Barru. Namun laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah setempat tidak lepas dari proses pendampingan dan penggunaan tenaga konsultan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Proses pendampingan dan penggunaan tenaga konsultan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dimungkinkan untuk membantu aparatur pengelola keuangan dalam memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang baru diterapkan di tahun anggaran 2015.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan di tahun anggaran berikutnya mampu dipertahankan, hal ini harus didukung dengan kompetensi sumber daya manusia yang cukup tinggi, kompetensi sumber daya manusia dapat terukur dengan melihat tanggungjawab yang dimiliki oleh aparatur pengelola keuangan, keikutsertaan aparatur pengelola keuangan dalam berbagai pelatihan, dan pengalaman yang dapat diperoleh aparatur pengelola keuangan selama proses pendampingan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini secara empiris menyimpulkan bahwa: (1) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, dan berpengaruh tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, (2) Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru, baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian maka beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah (1) Diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan dan pertimbangan pada pemerintah kabupaten Barru agar dapat memanfaatkan teknologi informasi, dan memperbaiki kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. (2) Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena memiliki banyak keterbatasan diantaranya jumlah sampel yang digunakan tidak cukup mengeneralisasi pemerintah kabupaten Barru dikarenakan kurangnya tingkat pengembalian responden. Penelitian ini menggunakan metode survei yang tidak dilengkapi dengan wawancara, meskipun dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai variabel independen akan tetapi belum dapat menunjukkan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal dimungkinkan karena beberapa hasil pengujian sebelumnya juga ditemukan hasil yang tidak konsisten dari satu peneliti ke peneliti lain. (3) Kurangnya pemahaman dari responden terhadap instrumen pertanyaan, serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab pertanyaan dapat menjadi masalah subjektivitas dari responden sehingga penelitian ini rentang terhadap bias dari jawaban responden, dan (4) Peneliti selanjutnya memperluas jumlah sampel untuk dapat mengeneralisasi hasil penelitian yang terkait, dengan memperluas jumlah sampel untuk seluruh SKPD yang ada di pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan. 2014. Daftar Opini Audit LKPD. (Online). Tersedia: http://www.bpk.go.id/assets/files/ihsps/2014/I/ihsps_i_2014_1414644515.pdf
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim. 2014. Abdul dan Kusufi. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. SNA XI. Pontianak
- Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Trikonomika
- Kajian Pustaka. 2013. Pengertian dan Jenis-jenis Opini Audit. (Online). Tersedia: <http://www.kajianpustaka.com/2013/10/pengertian-dan-jenis-jenis-opini-audit.html>
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Ed. Pertama. Andi, Yogyakarta
- Osman, O. (2007). Teknologi Informasi dan Komunikasi . depok: Arya Duta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Roviyantie, Devi. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Jurnal Accounting. Vol 1, No.1.
- Sugiyono. 2008. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. 2003. Akuntansi Pengantar. Yogyakarta: BPFE
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Wahana Komputer. 2003. Promosi Efektif dengan Web. Wahana Komputer, Semarang.
- Wati. Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014).
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosuka Wonosraten). SNA XIII. Purwokerto
- Wilkinson, Josep W. Et al. 2000. Accounting Information System Essential Concept and Application. 4 Edition, John Willey & Sons Inc. New York-USA.

LAMPIRAN TABEL

Tabel 1. Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Barru
Tahun 2009-2015

No	Tahun	Opini BPK
1	2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2010	Tidak Memberi Pendapat (TMP)
3	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2016

Tabel 2. Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Total Kuesioner yang disebar	120
Kuesioner kembali	67
Tingkat Pengembalian Kuesioner (67/120)	55%
Kuesioner tidak diisi lengkap	3
Kuesioner yang bisa diolah	64

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Tabel 3. Deskriptif Statistik

Nama Variabel	Rata-rata	Std. Deviation	N
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X)	3,96	3,355	64
Kompetensi Sumber Daya manusia (X)	3,69	5,080	64
Standar Akuntansi Pemerintahan (M)	3,86	4,387	64
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	4,06	5,038	64

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson Correlation (validitas)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X)	0,498 – 0,745	0,000 – 0,000	Valid
Kompetensi Sumber Daya manusia (X)	0,553 – 0,684	0,000 – 0,000	Valid
Standar Akuntansi Pemerintahan (M)	0,413 – 0,522	0,001 – 0,000	Valid



Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,502 – 0,605	0,000 – 0,000	Valid
-------------------------------	---------------	---------------	-------

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	Cronbach's Alpha (α)	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X)	0,723	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya manusia (X)	0,909	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintahan (M)	0,823	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,901	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel 6. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,343 ^a	,118	,089	4,1874

a. Predictors: (Constant), PTI, KSDM

Tabel 7. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	142,861	2	71,431	4,074	,022 ^b
	Residual	1069,576	61	17,534		
	Total	1212,437	63			

a. Dependent Variable: SAP

b. Predictors: (Constant), PTI, KSDM

Tabel 8. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	24,690	4,933		5,005	,000
	KSDM	,118	,106	,136	1,110	,271
	PTI	,377	,161	,289	2,349	,022

a. Dependent Variable: SAP

Tabel 9. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,557 ^a	,310	,275	4,2887

a. Predictors: (Constant), SAP, KSDM, PTI

Tabel 10. ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	495,647	3	165,216	8,982	,000 ^b
	Residual	1103,587	60	18,393		
	Total	1599,234	63			

a. Dependent Variable: KLK

b. Predictors: (Constant), SAP, KSDM, PTI

Tabel 11. Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,129	6,001		1,188	,240
	KSDM	,004	,110	,004	,037	,970
	PTI	,558	,172	,371	3,248	,002
	SAP	,359	,131	,312	2,734	,008

a. Dependent Variable: KLK